



BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 107 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG  
RENCANA KERJA KECAMATAN CIBALONG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 82 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cibalong Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 82 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cibalong Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 82 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cibalong Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 82);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN CIBALONG TAHUN 2023.

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 82 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cibalong Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 82) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2023 NOMOR 107

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 107 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI GARUT NOMOR 82  
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA  
KERJA KECAMATAN CIBALONG  
TAHUN 2023

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat atau sektor swasta lainnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke empat dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan pasal 243 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dan atau kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Perubahan RKPD meliputi Perubahan :

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;



- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan “Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat” telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Muatan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 agar perlu memperhatikan diantaranya Program dan Kegiatan yang diperlukan serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2023, Kemampuan keuangan Daerah melalui APBD, mengakomodir pendanaan DAK dan APBD Provinsi, memuat target kinerja yang sudah di tetapkan pada Perubahan Renstra diantaranya Program prioritas, program unggulan, program mendesak dan SPM. Perencanaan perubahan difokuskan pada pergeseran pagu kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening belanja, perubahan target kinerja, pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.



## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem





- Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan



- Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);



25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
31. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut



- (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
32. Peraturan Bupati Garut Nomor 184 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Cibalong;
  33. Peraturan Bupati Garut Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Kecamatan Cibalong Tahun 2023;
  34. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);
  35. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36).

### 1.3 **Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cibalong ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan pencapaian target dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Kecamatan Cibalong Tahun 2023

#### **2. Tujuan**

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cibalong Tahun 2023, yaitu :

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan Renstra dengan tujuan perencanaan dan penganggaran Tahunan.
- b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- c. Menjadi pedoman pengendalian program dan kegiatan tahun 2023.
- d. Sebagai bahan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perangkat Daerah.



#### 1.4 **Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cibalong sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibalong
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

#### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada Bab ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintahan Daerah serta Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi, Tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah serta Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, lokasi serta sasaran perubahan kelompok penerima manfaat, dan pagu perubahan renja tahun 2023.

- 3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Sebelum dan Sesudah Perubahan;
- 3.2. Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Semula dan Menjadi

#### **BAB IV PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.



## **BAB II**

### **EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Kecamatan Cibalong sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra**

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan Renstra dan RKPD, berdasarkan pagu dan realisasi Renstra serta RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, serta rata-rata capaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan rata-rata capaian Renja pada Triwulan II Tahun 2023.

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tidak menjadi capaian RKPD atau Renja. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Untuk mengetahui informasi dimaksud, juga dimuat persandingan antara realisasi anggaran RKPD dan APBD.

Selengkapnya hasil evaluasi rencana strategis dan rencana tahunan Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

##### **2.1.1. Realisasi Anggaran Program Renstra**

Realisasi anggaran Renstra merupakan akumulasi realisasi anggaran tahunan dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan. Realisasi anggaran Renstra Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:





**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program**  
**Renstra Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut Tahun 2019-2024**  
**Sampai Triwulan II Tahun 2023**

<b>URUSAN DAN PROGRAM</b>	<b>PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023</b>	<b>% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023</b>	<b>REALISASI APBD TW II TAHUN 2023</b>
<b>KECAMATAN CIBALONG</b>	<b>4.210.196.069</b>	<b>29,79</b>	<b>1.254.176.591</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.728.340.369</b>	<b>26</b>	<b>969.237.791</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>14.129.200</b>	<b>267,1</b>	<b>6.563.600</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.414.800	0	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.800.000	0	-
Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.800.000	41,11	740.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.800.000	16,67	300.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.800.000	25	450.000
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.814.800	84,34	2.374.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.699.600	100	2.699.600
<b>Administrasi Keuangan</b>	<b>1.484.645.537</b>	<b>80</b>	<b>812.351.615</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.481.819.937	54,77	811.638.815
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.825.600	25,23	712.800
<b>Administrasi Kepegawaian</b>	<b>8.986.600</b>	<b>100</b>	<b>8.986.600</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.986.600	100	8.986.600
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>125.197.132</b>	<b>480,2</b>	<b>81.838.282</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.747.800	49,78	2.861.200
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	28.244.900	59,52	16.811.950
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.167.500	0	-
Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	7.744.000	57,62	4.461.900
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.692.800	58,34	3.321.200
Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.287.000	78,36	15.113.900
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.000.000	76,58	9.955.000
Penatausahaan Arsip Dinamis	29.313.132	100	29.313.132





<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>1,2</b>	<b>24.000.000</b>
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000.000	1,2	24.000.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>67.391.900</b>	<b>125,7</b>	<b>22.430.894</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.102.900	19,51	7.630.894
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.289.000	47,89	7.800.000
Penyediaan Jasa Pelayanan	12.000.000	58,33	7.000.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>27.990.000</b>		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	27.990.000	46,68	13.066.800
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan</b>	<b>145.722.800</b>	<b>98,73</b>	<b>68.385.600</b>
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>115.447.400</b>	<b>45,2</b>	<b>52.178.200</b>
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	115.447.400	45,2	52.178.200
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan</b>	<b>30.275.400</b>	<b>53,53</b>	<b>16.207.400</b>
Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	30.275.400	53,53	16.207.400
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>80.000.000</b>	<b>66,33</b>	<b>80.000.000</b>
<b>Koordinasi Kegiatan</b>	<b>30.000.000</b>	<b>66,325</b>	<b>19.896.900</b>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum	15.000.000	89,8	13.470.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.000.000	42,85	6.426.900
<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat</b>	<b>50.000.000</b>	<b>69,8</b>	<b>15.090.000</b>
Penyelenggaraan Lembaga	20.000.000	58,5	11.700.000
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa Dan Kelurahan	30.000.000	11,3	3.390.000
<b>Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>116.826.300</b>	<b>221,9</b>	<b>89.995.000</b>
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman</b>	<b>106.879.300</b>	<b>159,36</b>	<b>83.776.500</b>
Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	56.879.300	59,56	33.876.500



Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.000.000	99,8	49.900.000
<b>Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah</b>	9.947.000	62,52	6.218.500
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9.947.000	62,52	6.218.500
<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>100.000.000</b>	<b>62,83</b>	<b>62.828.300</b>
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100.000.000	62,83	62.828.300
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100.000.000	62,83	62.828.300
<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>39.306.600</b>	<b>233,4</b>	<b>28.743.000</b>
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	39.306.600	233,42	28.743.000
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.498.200	39,21	1.763.800
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	20.000.000	97,85	19.570.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4.142.000	43,96	1.821.000
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	10.666.400	52,39	5.588.200

Sumber : Pengolahan Data LRA Kecamatan Cibalong 2023

Dari tabel diatas, menggambarkan perbandingan pagu indikatif Renstra Tahun 2023 terhadap realisasi APBD TA. 2023, dari total pagu indikatif Renstra Tahun 2023 sebesar **Rp. 4.210.196.069,00**, melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2023 dalam pelaksanaannya pada APBD TA. 2023, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar **Rp. 1.254.176.591,00** atau sebesar **29,79%**.

### 2.1.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENSTRA

Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program RENSTRA dapat diwujudkan. Berdasarkan data hasil evaluasi Renja Tahun 2023, diperoleh rata-rata tingkat capaian 29,79%, dan rata-rata tingkat capaian terhadap target akhir Renstra sebesar 3,36%. Dari 6 (enam) Program, 16 (enam belas) Kegiatan, dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan.



Secara rinci evaluasi tingkat capaian Kinerja Kecamatan Cibalong Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan tersaji dalam Tabel 2.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program RENSTRA Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Sampai Triwulan II Tahun 2023**

URUSAN DAN PROGRAM	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran %
<b>Kecamatan Cibalong</b>	<b>3,36</b>	<b>29,79</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3,85</b>	<b>26,00</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	2,15	<b>38,16</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,43	41,11
Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	6,00	16,67
Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4,00	25,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,19	84,34
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,00	100,00
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	1,83	<b>40,00</b>
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	1,83	54,77
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,96	25,23
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	1,00	<b>100,00</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1,00	100,00
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	1,53	<b>480,20</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,01	49,78
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,68	59,52
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,74	57,62
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1,71	58,34
Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,28	78,36
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,31	76,58
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1,00	100,00
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	83,33	<b>1,20</b>
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	83,33	1,20
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	3,00	<b>62,87</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5,12	19,51
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,09	47,89



Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,71	58,33
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	2,14	46,68
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	2,14	46,68
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>2,13</b>	<b>98,73</b>
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	2,21	45,20
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2,21	45,20
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan</b>	1,87	53,53
Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	1,87	53,53
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>1,00</b>	<b>197,46</b>
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	1,51	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1,11	89,80
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2,33	42,85
<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	3,31	69,80
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1,71	58,50
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa Dan Kelurahan	8,85	11,30
<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>1,30</b>	<b>71,10</b>
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	1,28	79,68
Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1,68	59,56
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1,00	99,80
<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah</b>	1,60	62,52
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1,60	62,52
<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>1,59</b>	<b>62,83</b>
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1,59	62,83
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1,59	62,83
<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>1,37</b>	<b>58,35</b>
<b>Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	1,37	58,35
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2,55	39,21
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1,02	97,85
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan	2,27	43,96



Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1,91	52,39

Sumber : pengolahan data LRA Kec. Cibalong 2023

## 2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023

### 2.2.1. Realisasi Anggaran Program Renja

Realisasi anggaran program Renja merupakan akumulasi realisasi anggaran seluruh kegiatan yang ada dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa target dan anggaran Renja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program dalam Renstra. Realisasi anggaran Renja Tahun 2023 sampai Triwulan II adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran**  
**RENJA Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut Tahun 2023**  
**Sampai Triwulan II Tahun 2023**

Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
<b>KECAMATAN CIBALONG</b>	<b>4.210.196.069</b>	<b>29,79</b>	<b>1.254.176.591</b>
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.728.340.369	26,00	969.237.791
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>14.129.200</b>	<b>38,16</b>	6.563.600
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.414.800	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.800.000	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.800.000	41,11	740.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.800.000	16,67	300.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.800.000	25,00	450.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.814.800	84,34	2.374.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.699.600	100,00	2.699.600
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.484.645.537</b>	<b>40,00</b>	812.351.615
Penyediaan Gaji dan Tunjangan asn	1.481.819.937	54,77	811.638.815
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.825.600	25,23	712.800
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>8.986.600</b>	<b>100,00</b>	8.986.600



Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.986.600	100,00	8.986.600
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>125.197.132</b>	<b>60,02</b>	81.838.282
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.747.800	49,78	2.861.200
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.244.900	59,52	16.811.950
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.167.500	0,00	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.744.000	57,62	4.461.900
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.692.800	58,34	3.321.200
Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.287.000	78,36	15.113.900
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Skpd	13.000.000	76,58	9.955.000
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd	29.313.132	100,00	29.313.132
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>1,20</b>	24.000.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000.000	1,20	24.000.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>67.391.900</b>	<b>62,87</b>	22.430.894
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	39.102.900	19,51	7.630.894
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	16.289.000	47,89	7.800.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.000.000	58,33	7.000.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>27.990.000</b>	<b>46,68</b>	13.066.800
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	27.990.000	46,68	13.066.800
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	145.722.800	98,73	68.385.600
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>115.447.400</b>	<b>45,20</b>	52.178.200
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	115.447.400	45,20	52.178.200
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan</b>	<b>30.275.400</b>	<b>53,53</b>	16.207.400





Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	30.275.400	53,53	16.207.400
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	80.000.000	69,58	80.000.000
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	30.000.000	66,32	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.000.000	89,80	13.470.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.000.000	42,85	6.426.900
<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	50.000.000	69,80	15.090.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	58,50	11.700.000
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	30.000.000	11,30	3.390.000
<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>116.826.300</b>	<b>71,10</b>	<b>89.995.000</b>
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</b>	106.879.300	79,68	83.776.500
Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	56.879.300	59,56	33.876.500
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.000.000	99,80	49.900.000
<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	9.947.000	62,52	6.218.500
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9.947.000	62,52	6.218.500
<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>100.000.000</b>	<b>62,83</b>	<b>62.828.300</b>
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100.000.000	62,83	62.828.300
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100.000.000	62,83	62.828.300



<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>39.306.600</b>	<b>77,81</b>	<b>28.743.000</b>
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	39.306.600	77,81	28.743.000
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.498.200	39,21	1.763.800
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	20.000.000	97,85	19.570.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4.142.000	43,96	1.821.000
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	10.666.400	52,39	5.588.200

Sumber : pengolahan data Sub Bagian Umum Kec. Cibalong 2023

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa secara rata-rata, realisasi anggaran Renja pada Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan bidang urusan pemerintahan adalah 29,79%. Realisasi Renja sangat dipengaruhi oleh konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD. Apabila suatu kegiatan dilaksanakan berdasarkan APBD namun kegiatan tersebut tidak ada dalam RKPD, maka realisasi kegiatan tersebut tidak mempengaruhi realisasi RKPD.

### **2.2.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENJA**

Tingkat capaian RENJA diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

Berdasarkan data pada RENJA Tahun 2023, capaian rata-rata RENJA Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 29,79% untuk target kinerja 3,36% target anggaran. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan termasuk pengadaan barang dan jasa yang sudah proses masih rendah. Apabila dilihat berdasarkan pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RENJA dimaksud adalah:





**Tabel 2.4**  
**Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program**  
**Renja Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut Tahun 2023**  
**Sampai Triwulan II Tahun 2023**

Urusan dan Bidang Program	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
	Kinerja	Realisasi Anggaran %
<b>KECAMATAN CIBALONG</b>	<b>3,36</b>	<b>29,79</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3,85</b>	<b>26,00</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	2,15	<b>38,16</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,43	41,11
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6,00	16,67
Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4,00	25,00
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,19	84,34
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,00	100,00
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1,83</b>	<b>80,00</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,83	54,77
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,96	25,23
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1,00	100,00
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1,53</b>	<b>60,02</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,01	49,78
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,68	59,52
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,74	57,62
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1,71	58,34
Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,28	78,36
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,31	76,58
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1,00	100,00
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>83,33</b>	<b>1,20</b>
Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	83,33	1,20
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3,00</b>	<b>41,91</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	5,12	19,51
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	2,09	47,89
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,71	58,33
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>0,00</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2,14	46,68
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2,13	98,73
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan</b>	<b>2,21</b>	<b>45,20</b>
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2,21	45,20



<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan</b>	1,87	53,53
Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	1,87	53,53
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1,00	66,32
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	0,00	66,32
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1,11	89,80
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2,33	42,85
<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	3,31	69,80
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1,71	58,50
Penanganan Covid-19 Di Tingkat Desa dan Kelurahan	8,85	11,30
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1,30	71,10
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	1,28	79,68
Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1,68	59,56
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1,00	99,80
<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	1,60	62,52
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1,60	62,52
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1,59	62,83
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1,59	62,83
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1,59	62,83
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1,37	58,35
<b>Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	1,37	58,35
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2,55	39,21
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1,02	97,85
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2,27	43,96
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1,91	52,39

Sumber : pengolahan data Sub Bagian Umum Kec. Cibalong 2023

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Cibalong Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan 2023 tersaji dalam Tabel 2.5 berikut :



**Tabel 2.5**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Cibalong Sampai dengan Tahun 2023**  
**Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Cibalong**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				-									
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>KECAMATAN CIBALONG</b>				4.210.196.069	2.807.372.176	2.413.345.648	2.294.506.456	<b>95%</b>	<b>4.210.196.069</b>	<b>1.254.176.591</b>	29,79%	
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan</b>	3.728.340.369	2.346.817.176	2.119.869.148	2.003.467.056	95%	3.728.340.369	969.237.791	26,00%	
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>02.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	14.129.200	94.194.650	17.136.000	17.136.000	100%	14.129.200	6.563.600	46,45%	
7	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.414.800	94.194.650	17.136.000	17.136.000	100%	1.414.800	-	0,00%
7	1	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.800.000	-	-	-	0,00	1.800.000	-	0,00%
7	1	1	02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.800.000	-	-	-	0,00	1.800.000	740.000	41,11%
7	1	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.800.000	-	-	-	0,00	1.800.000	300.000	16,67%
7	1	1	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.800.000	-	-	-	0,00	1.800.000	450.000	25,00%
7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	2.814.800	-	-	-	0,00	2.814.800	2.374.000	84,34%



					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
7	1	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.699.600	-	-	-	0,00	2.699.600	2.699.600	100,00%
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	02.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	1.484.645.537	1.426.974.388	1.657.293.851	1.548.722.732	93%	1.484.645.537	812.351.615	54,72%
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.481.819.937	1.426.974.388	1.648.878.351	1.540.717.232	93%	1.481.819.937	811.638.815	54,77%
7	1	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.825.600	-	8.415.500	8.005.500	95%	2.825.600	712.800	25,23%
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	02.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	8.986.600	26.692.200	9.620.200	9.620.200	100%	8.986.600	8.986.600	100,00%
7	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8.986.600	11.992.200	9.620.200	9.620.200	100%	8.986.600	8.986.600	100,00%
7	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	14.700.000	-	-	0,00	-	-	0,00
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	02.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	125.197.132	327.235.730	179.563.055	179.561.930	100%	125.197.132	81.838.282	65,37%
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.747.800	4.638.400	6.258.000	6.258.000	100%	5.747.800	2.861.200	49,78%
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.244.900	191.256.090	41.430.400	41.429.800	100%	28.244.900	16.811.950	59,52%
7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.167.500	8.945.850	14.138.155	14.137.630	100%	16.167.500	-	0,00%
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.744.000	24.172.990	9.116.500	9.116.500	100%	7.744.000	4.461.900	57,62%
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.692.800	5.422.400	5.370.000	5.370.000	100%	5.692.800	3.321.200	58,34%
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.287.000	48.000.000	39.170.000	39.170.000	100%	19.287.000	15.113.900	78,36%
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.000.000	44.800.000	64.080.000	64.080.000	100%	13.000.000	9.955.000	76,58%



7	1	1	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	29.313.132	-	-	0,00	29.313.132	29.313.132	100,00%	
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	02.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	2.000.000.000	146.917.500	185.804.130	184.972.780	100%	2.000.000.000	24.000.000	1,20%
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	70.339.000	-	-	0,00	-	-	0,00
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	-	76.578.500	-	-	0,00	-	-	0,00
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	97.281.630	96.981.550	100%	-	-	0,00
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000.000	-	88.522.500	87.991.230	99%	2.000.000.000	24.000.000	1,20%
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	02.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	67.391.900	55.456.808	50.915.012	44.229.714	87%	67.391.900	22.430.894	33,28%
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.102.900	15.726.608	22.032.000	15.346.714	70%	39.102.900	7.630.894	19,51%
7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.289.000	-	7.210.000	7.210.000	100%	16.289.000	7.800.000	47,89%
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.000.000	39.730.200	21.673.012	21.673.000	100%	12.000.000	7.000.000	58,33%
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	02.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	27.990.000	269.345.900	19.536.900	19.223.700	98%	27.990.000	13.066.800	46,68%
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.990.000	15.757.400	19.536.900	19.223.700	98%	27.990.000	13.066.800	46,68%
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	253.588.500	-	-	0,00	-	-	0,00
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	145.722.800	254.323.500	105.476.700	105.306.650	100%	145.722.800	68.385.600	46,93%



						<b>yang dilaksanakan oleh Kecamatan</b>									
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	02.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	115.447.400	231.172.500	83.803.400	83.633.350	100%	115.447.400	52.178.200	45,20%	
7	1	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	115.447.400	231.172.500	83.803.400	83.633.350	100%	115.447.400	52.178.200	45,20%	
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	02.02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	30.275.400	23.151.000	21.673.300	21.673.300	100%	30.275.400	16.207.400	53,53%	
7	1	2	02.02	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	30.275.400	23.151.000	21.673.300	21.673.300	100%	30.275.400	16.207.400	53,53%	
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan</b>	80.000.000	47.245.300	14.601.400	14.461.400	99%	80.000.000	34.986.900	43,73%	
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	02.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	30.000.000	47.245.300	14.601.400	14.461.400	99%	30.000.000	19.896.900	66,32%	
7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.000.000	25.835.300	6.185.400	6.185.400	100%	15.000.000	13.470.000	89,80%	
7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.000.000	21.410.000	8.416.000	8.276.000	98%	15.000.000	6.426.900	42,85%	
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	02.03		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	20.000.000	-	-	-	0,00	20.000.000	11.700.000	58,50%	
7	1	3	02.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	-	-	-	0,00	20.000.000	11.700.000	58,50%	
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	02.05		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	<b>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	30.000.000	-	-	-	0,00	30.000.000	3.390.000	11,30%	
7	1	3	02.05	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	30.000.000	-	-	-	0,00	30.000.000	3.390.000	11,30%	
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>4</b>			<b>PROGRAM KOORDINASI</b>	<b>Persentase Penanganan</b>	116.826.300	57.529.200	67.973.400	67.623.350	99%	116.826.300	89.995.000	77,03%	





					<b>KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Gangguan Trantibum</b>									
7	1	4	02.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	106.879.300	57.529.200	57.000.000	57.000.000	100%	106.879.300	83.776.500	78,38%	
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	56.879.300	57.529.200	57.000.000	57.000.000	100%	56.879.300	33.876.500	59,56%	
7	1	4	02.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.000.000				0,00	50.000.000	49.900.000	99,80%	
7	1	4	02.02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	9.947.000	-	10.973.400	10.623.350	97%	9.947.000	6.218.500	62,52%	
7	1	4	02.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9.947.000	-	10.973.400	10.623.350	97%	9.947.000	6.218.500	62,52%	
7	1	5			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat</b>	100.000.000	96.000.000	65.200.000	65.025.000	100%	100.000.000	62.828.300	62,83%	
7	1	5	02.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	100.000.000	96.000.000	65.200.000	65.025.000	100%	100.000.000	62.828.300	62,83%	
7	1	5	02.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100.000.000	96.000.000	65.200.000	65.025.000	100%	100.000.000	62.828.300	62,83%	
7	1	6			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Berkinerja Baik</b>	39.306.600	5.457.000	40.225.000	38.623.000	96%	39.306.600	28.743.000	73,13%	
7	1	6	02.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	39.306.600	5.457.000	40.225.000	38.623.000	96%	39.306.600	28.743.000	73,13%	



7	1	6	02.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.498.200	5.457.000	8.883.000	8.731.000	98%	4.498.200	1.763.800	39,21%
7	1	6	02.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	20.000.000				0,00	20.000.000	19.570.000	97,85%
7	1	6	02.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4.142.000	-	23.048.000	21.598.000	94%	4.142.000	1.821.000	43,96%
7	1	6	02.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	10.666.400	-	8.294.000	8.294.000	100%	10.666.400	5.588.200	52,39%

Sumber : Pengolahan Data Kecamatan Cibalong, 2023





Adapun evaluasi terhadap kinerja keuangan yang dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Kecamatan Cibalong Tahun 2023 menunjukkan dari total anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 4.210.196.069,00 (empat milyar dua ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh enam ribu enam puluh sembilan rupiah) sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasi sebesar Rp 1.254.176.591,00 (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) atau mencapai 29,79%. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Kecamatan/ Cibalong Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut

**Tabel 2. 6**  
**Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan/Cibalong Tahun 2023 sampai dengan triwulan II.**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		Sisa Anggaran	%
	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi s.d Triwulan II (Rp)		
KECAMATAN CIBALONG	4.210.196.069	1.254.176.591	2.956.019.478	29,79
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.728.340.369	969.237.791	2.759.102.578	26,00
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>14.129.200</b>	<b>6.563.600</b>	7.565.600	<b>38,16</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.414.800	-	1.414.800	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.800.000	-	1.800.000	0,00
Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.800.000	740.000	1.060.000	41,11
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.800.000	300.000	1.500.000	16,67
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.800.000	450.000	1.350.000	25,00
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.814.800	2.374.000	440.800	84,34
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.699.600	2.699.600	-	100,00
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.484.645.537</b>	<b>812.351.615</b>	672.293.922	<b>80,00</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.481.819.937	811.638.815	670.181.122	54,77
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.825.600	712.800	2.112.800	25,23
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>8.986.600</b>	<b>8.986.600</b>	-	<b>100,00</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.986.600	8.986.600	-	100,00
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>125.197.132</b>	<b>81.838.282</b>	43.358.850	<b>60,02</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.747.800	2.861.200	2.886.600	49,78
Penyediaan Peralatan Dan	28.244.900	16.811.950	11.432.950	59,52



Perlengkapan Kantor				
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.167.500	-	16.167.500	0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.744.000	4.461.900	3.282.100	57,62
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	5.692.800	3.321.200	2.371.600	58,34
Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.287.000	15.113.900	4.173.100	78,36
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.000.000	9.955.000	3.045.000	76,58
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	29.313.132	29.313.132	-	100,00
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	1.976.000.000	<b>1,20</b>
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000.000	24.000.000	1.976.000.000	1,20
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>67.391.900</b>	<b>22.430.894</b>	44.961.006	<b>41,91</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.102.900	7.630.894	31.472.006	19,51
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.289.000	7.800.000	8.489.000	47,89
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.000.000	7.000.000	5.000.000	58,33
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	27.990.000		27.990.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.990.000	13.066.800	14.923.200	46,68
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>145.722.800</b>	<b>68.385.600</b>	<b>77.337.200</b>	<b>98,73</b>
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	115.447.400	52.178.200	63.269.200	45,20
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	115.447.400	52.178.200	63.269.200	45,20
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan</b>	30.275.400	16.207.400	14.068.000	53,53
Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	30.275.400	16.207.400	14.068.000	53,53
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>80.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	-	<b>66,32</b>
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	30.000.000		30.000.000	66,32
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.000.000	13.470.000	1.530.000	89,80
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.000.000	6.426.900	8.573.100	42,85



<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	50.000.000	15.090.000	34.910.000	69,80
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	11.700.000	8.300.000	58,50
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa Dan Kelurahan	30.000.000	3.390.000	26.610.000	11,30
<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>116.826.300</b>	<b>89.995.000</b>	<b>26.831.300</b>	<b>71,10</b>
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	106.879.300	83.776.500	23.102.800	79,68
Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	56.879.300	33.876.500	23.002.800	59,56
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.000.000	49.900.000	100.000	99,80
<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah</b>	9.947.000	6.218.500	3.728.500	62,52
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9.947.000	6.218.500	3.728.500	62,52
<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>100.000.000</b>	<b>62.828.300</b>	<b>37.171.700</b>	<b>62,83</b>
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100.000.000	62.828.300	37.171.700	62,83
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100.000.000	62.828.300	37.171.700	62,83
<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>39.306.600</b>	<b>28.743.000</b>	<b>10.563.600</b>	<b>58,35</b>
<b>Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	39.306.600	28.743.000	10.563.600	58,35
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.498.200	1.763.800	2.734.400	39,21
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	20.000.000	19.570.000	430.000	97,85
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4.142.000	1.821.000	2.321.000	43,96
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	10.666.400	5.588.200	5.078.200	52,39

Sumber : Pengolahan Data Kecamatan Cibalong, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat sub kegiatan yang tidak mencapai target, hal ini dikarenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada Triwulan III atau IV Tahun 2023 Selain itu, terdapat pula sub kegiatan yang sudah mencapai target yang disebabkan karena Program, Kegiatan dan



Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana. Adapun Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan triwulan II Kecamatan Cibalong dari 6 (enam) Program dan 16 (enam belas) Kegiatan, 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada Perangkat Daerah Kecamatan Cibalong dalam pelaksanaan Renja 2023 sampai dengan Triwulan II antara lain :
  - 1) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 2.699.600.00
  - 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 8.986.600.00
  - 3) Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 29.313.132.00
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Perangkat Daerah Kecamatan Cibalong Tahun 2023 Tidak ada.
3. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:
    - 1) Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, adanya mutasi pegawai sehingga anggaran untuk pemberian gaji/belanja pegawai tidak terserap seluruhnya.
    - 2) Sedangkan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, tidak/belum memenuhi target disebabkan program dan kegiatan akan dilaksanakan pada tahap berikutnya.



- b. Faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan adalah dikarenakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana.
4. Program/kegiatan yang belum terealisasi karena kegiatan masih akan dilaksanakan pada Triwulan III atau IV Tahun 2023 yang direncanakan dalam Renja 2023 Perangkat Daerah Kecamatan Cibalong Tahun 2023, antara lain :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah prosentase realisasi keuangan 0%, pagu anggaran Rp. 1.414.800,00 terealisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 0,00
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD prosentase realisasi keuangan 0%, pagu anggaran Rp. 1.800.000,00 terealisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 0,00
    - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD prosentase realisasi keuangan 41,11%, pagu anggaran Rp. 1.800.000,00 terealisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 740,00
    - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD prosentase realisasi keuangan 16,66%, pagu anggaran Rp. 1.800.000,00 terealisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 300,000,00
    - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD prosentase realisasi keuangan 25%, pagu anggaran Rp. 1.800.000,00 terealisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 450,00
    - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD prosentase realisasi keuangan 84,34%, pagu anggaran Rp. 2.814.800,00 terealisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 2,374,000,00
    - 7) Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN prosentase realisasi keuangan 54,77%, pagu anggaran Rp. 1.481.819.937,00 terealisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 812.351.615,00
    - 8) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD prosentase realisasi keuangan 25,22%, pagu anggaran 2.825.600,00 realisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 712.800,00



- 9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor prosentase 49,77%, pagu anggaran Rp. 6.5747.800,00 terealisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 2.861.200,00
- 10) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor realisasi 40,36%, anggaran Rp. 28.244.900,00 terealisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 11.401.100,00
- 11) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga realisasi keuangan 0%, pagu anggaran Rp. 16.167.500,00 terealisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 0,00
- 12) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan prosentase realisasi keuangan 57,62%, pagu anggaran Rp. 7.744.000,00 terealisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 4.461.900,00
- 13) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan prosentase realisasi keuangan 58,34%, pagu anggaran Rp. 5.692.800,00 terealisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 3.321.200,00
- 14) Fasilitas Kunjungan Tamu prosentase realisasi keuangan 78,36%, pagu anggaran Rp. 19.287.000,00 terealisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 15.113.900,00
- 15) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD prosentase realisasi keuangan 76,58%, pagu anggaran Tahun 2023 Rp. 13.000.000,00 terealisasi sampai dengan Triwulan II Rp.9.955.000,00
- 16) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya prosentase 1,2%, anggaran Tahun 2023 Rp. 2.000.000.000,00 realisasi Rp. 24.000.000,00
- 17) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik prosentase realisasi keuangan 19,51%, anggaran Rp. 39.102.900,00 terealisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 7.630.894,00
- 18) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor prosentase realisasi keuangan 47,89%, anggaran Tahun 2023 Rp. 16.289.000,00 terealisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 7.800.000,00
- 19) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor prosentase realisasi keuangan 58,55%, pagu anggaran Rp. 12.000.000,00 terealisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 7.000.000,00





- 20) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan prosentase realisasi keuangan 46,68%, pagu anggaran Rp. 27.990.000,00 terealisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 13.066.800,00
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**  
Prosentase Realisasi Keuangan 98,73%, Pagu Anggaran Rp. 145.722.800,00 Terealisasi Sampai Dengan Triwulan II Rp. 68.385.600,00
- 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan prosentase realisasi keuangan 45,20%, pagu anggaran Rp. 115.447.400,00 terealisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 52.178.250,00
- 2) Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan prosentase realisasi keuangan 53,53%, pagu anggaran Rp. 30.275.400,00 terealisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 16.207.400,00
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**  
prosentase realisasi keuangan 66,32%, pagu anggaran Rp. 80.000.000,00 terealisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 34.986.900,00
- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa prosentase realisasi keuangan 89,80%, pagu anggaran Rp. 15.000.000,00 terealisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 13.470.000,00
- 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan prosentase realisasi keuangan 42,85%, pagu anggaran Rp. 15.000.000,00 terealisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 6.426.900,00
- 3) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Peningkatan prosentase realisasi keuangan 58,50%, pagu anggaran Rp. 20.000.000,00 terealisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 11.700.000,00
- 4) Penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan prosentase realisasi keuangan 11,30%, pagu anggaran Rp. 30.000.000,00 terealisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 3.390.000,00
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**  
prosentase realisasi keuangan 71,10%, pagu anggaran Rp. 116.826.300,00 terealisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 89.995.000,00



- 1) Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan prosentase realisasi keuangan 59,56%, pagu anggaran Rp. 56.879.300,00 terealisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 33.876.500,00
- 2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat prosentase realisasi keuangan 99,80%, pagu anggaran Rp. 50.000.000,00 terealisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 49.900.000,00
- 3) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia prosentase realisasi keuangan 62,52% pagu anggaran Rp. 9.947.000,00 terealisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 6.218.500,00

**5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

prosentase realisasi keuangan 62,83 % pagu anggaran Tahun 2023 Rp. 100.000.000,00 terealisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 62.828.300,00

- 1) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan prosentase realisasi keuangan 62,83 % pagu anggaran Tahun 2023 Rp. 100.000.000,00 terealisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 62.828.300,00

**6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

prosentase realisasi keuangan 58,35% pagu anggaran Rp. 39.306.600,00 terealisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 28.743.000,00

- 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa prosentase realisasi keuangan 39,21 % pagu anggaran Rp. 4.498.200,00 terealisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 1.763.800,00
- 2) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi prosentase realisasi keuangan 97,85 % pagu anggaran Tahun 2023 Rp. 20.000.000,00 terealisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 19.570.000,00
- 3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan prosentase realisasi keuangan 43,96% pagu anggaran Rp. 4.142.000,00 terealisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 1.821.000,00
- 4) Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif prosentase realisasi keuangan 52,39%, pagu anggaran Rp.





10.666.400,00 terealisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 5.588.200,00

5. Program/kegiatan yang diminimalisir/dihapus/dihilangkan karena anggaran diefisiensi yang direncanakan Perangkat Daerah Kecamatan Cibalong Tahun 2023, tidak ada.
6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cibalong adalah sebagai berikut :
  - a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cibalong tahun 2023 (TW II) berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Cibalong pada umumnya.
  - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Kecamatan Cibalong berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Cibalong.
7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab belum tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan. Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain :
  - a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
  - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.
  - c. Perlu adanya percepatan penyerapan anggaran pada Triwulan III dan IV.

Selanjutnya Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program Renstra dapat diwujudkan. Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Cibalong selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini :



**Tabel 2.7**  
**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota**  
**Renja Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut**  
**Periode Pelaksanaan Tahun 2023 TW II**

No	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Triwulanan Tahun 2023 (TW 2)								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%) 14=13/5 x 100%	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang/Kasi)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp			K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6+12	14=13/5 x 100%		
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	1.872.299,653	102	1.915.777,906	100	3.728.340,369	9,16	341.494,452	26,00	969.237,791	-	-	-	26,00	969.237,791	100	1.310.732,243	35,16%	Kec. Cibalong	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	17.136.000	100	17.138.000	100	14.129.200	38,03	5.373.600	46,45	6.563.600	-	-	-	46,45	6.563.600	100	11.937.200	84,49%	Kec. Cibalong	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	17.136.000	100	17.138.000	100	1.414.800	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	0,00%	Kec. Cibalong	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	0,00	-	-	1.800.000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	0,00%	Kec. Cibalong	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	0,00	-	-	1.800.000	0,00	-	41,11	740.000	-	-	-	41,11	740.000	-	740.000	41,11%		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	0,00	-	-	1.800.000	16,67	300.000	16,67	300.000	-	-	-	16,67	300.000	-	600.000	33,33%		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	0,00	-	-	1.800.000	0,00	-	25,00	450.000	-	-	-	25,00	450.000	-	450.000	25,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	-	-	0,00	-	-	2.814.800	84,34	2.374.000	84,34	2.374.000	-	-	-	84,34	2.374.000	-	4.748.000	168,68%		



	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	0,00	-	-	2.699.600	100,00	2.699.600	100,00	2.699.600			100,00	2.699.600		5.399.200	200,00%	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	1.531.546.856	101	1.548.722.732	100	1.484.645.537	17,87	265.246.442	54,72	812.351.615	-	-	54,72	812.351.615	100	1.077.598.057	72,58%	Kec. Cibalong
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	1.523.131.356	101	1.540.717.232	100	1.481.819.937	17,85	264.533.642	54,77	811.638.815	-	-	54,77	811.638.815	100	1.076.172.457	72,63%	Kec. Cibalong
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	8.415.500	95	8.005.500	100	2.825.600	25,23	712.800	25,23	712.800	-	-	25,23	712.800	100	1.425.600	50,45%	Kec. Cibalong
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	9.620.200	100	9.620.200	100	8.986.600	100,00	8.986.600	100	8.986.600	-	-	100	8.986.600	100	17.973.200	200,00%	Kec. Cibalong
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100	9.620.200	100	9.620.200	100	8.986.600	100,00	8.986.600	100	8.986.600	-	-	100	8.986.600	100	17.973.200	200,00%	Kec. Cibalong
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	-	-	0,00	-	100	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-	100	-	0,00	Kec. Cibalong
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	0,00	-	100	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-	100	-	0,00	Kec. Cibalong
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	179.563.055	100	179.561.930	100	125.197.132	18,08	22.639.650	65,37	81.838.282	-	-	65,37	81.838.282	100	104.477.932	83,45%	Kec. Cibalong
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	6.258.000	100	6.258.000	100	5.747.800	6,66	382.900	49,78	2.861.200	-	-	49,78	2.861.200	100	3.244.100	56,44%	Kec. Cibalong
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	41.430.400	100	41.429.800	100	28.244.900	26,10	7.372.250	59,52	16.811.950	-	-	59,52	16.811.950	100	24.184.200	85,62%	Kec. Cibalong
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	14.138.155	100	14.137.630	100	16.167.500	0,00	-	-	-	-	-	-	-	100	-	0,00%	Kec. Cibalong
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	9.116.500	100	9.116.500	100	7.744.000	31,33	2.426.100	57,62	4.461.900	-	-	57,62	4.461.900	100	6.888.000	88,95%	Kec. Cibalong
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	100	5.370.000	100	5.370.000	100	5.692.800	24,99	1.422.400	58,34	3.321.200	-	-	58,34	3.321.200	100	4.743.600	83,33%	Kec. Cibalong





		Daerah																				
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	19.536.900	98	19.223.700	100	27.990.000	23,30	6.522.500	46,68	13.066.800	-	-	-	46,68	13.066.800	100	19.589.300	69,99%	Kec. Cibalong
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	19.536.900	98	19.223.700	100	27.990.000	23,30	6.522.500	46,68	13.066.800	-	-	-	46,68	13.066.800	100	19.589.300	69,99%	Kec. Cibalong
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	100	-	0,00	0,00	Kec. Cibalong
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	-	0,00	-	100	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	100	-	0,00	0,00	Kec. Cibalong
	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100	105.476.700	100	105.306.650	100	145.722.800	28,78	41.936.250	46,93	68.385.600	-	-	-	46,93	68.385.600	100	110.321.850	75,71%	Kec. Cibalong
		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	83.803.400	100	83.633.350	100	115.447.400	30,52	35.236.850	45,20	52.178.200	-	-	-	45,20	52.178.200	100	87.415.050	75,72%	Kec. Cibalong
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	83.803.400	100	83.633.350	100	115.447.400	30,52	35.236.850	45,20	52.178.200	-	-	-	45,20	52.178.200	100	87.415.050	75,72%	Kec. Cibalong
		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	21.673.300	100	21.673.300	100	30.275.400	22,13	6.699.400	69,84	16.207.400	-	-	-	69,84	16.207.400	100	22.906.800	75,66%	Kec. Cibalong
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	100	21.673.300	100	21.673.300	100	30.275.400	22,13	6.699.400	53,53	16.207.400	-	-	-	53,53	16.207.400	100	22.906.800	75,66%	Kec. Cibalong
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	69,84	-	-	-	69,84	-	100	-	0,00	0,00	Kec. Cibalong
	Meningkatnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	14.601.400	99	14.461.400	100	80.000.000	22,75	18.200.600	43,73	34.986.900	-	-	-	43,73	34.986.900	100	53.187.500	66,48%	Kec. Cibalong



	Pembe rdayaa n Masyar akat Desa/ Kelura han	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	yang dapat diberdayakan																			
		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10 0	14.601.400	99	14.461.400	10 0	30.000.000	44,44	13.330.60 0	66,32	19.896.90 0	-	-	-	66,32	19.896.90 0	10 0	33.227.500	110,76 %	Kec. Cibalong
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 0	6.185.400	10 0	6.185.400	10 0	15.000.000	61,67	9.250.000	89,80	13.470.00 0	-	-	-	89,80	13.470.00 0	10 0	22.720.000	151,47 %	Kec. Cibalong
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 0	8.416.000	98	8.276.000	10 0	15.000.000	27,20	4.080.600	42,85	6.426.900	-	-	-	42,85	6.426.900	10 0	10.507.500	70,05 %	Kec. Cibalong
		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah koordinasi pemberdayaan masyarakat	10 0	-	0,0 0	-	10 0	50.000.000	9,74	4.870.000	30,18	15.090.00 0	-	-	-	30,18	15.090.00 0	10 0	19.960.000	39,92 %	Kec. Cibalong
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	-	-	0,0 0	-	10 0	20.000.000	24,35	4.870.000	58,50	11.700.00 0	-	-	-	58,50	11.700.00 0	10 0	16.570.000	82,85 %	Kec. Cibalong
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembelakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		-	-	0,0 0	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	10 0	-	0,00	Kec. Cibalong
		Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	-	-	0,0 0	-	10 0	30.000.000	0,00	-	11,30	3.390.000	-	-	-	11,30	3.390.000	10 0	3.390.000	11,30 %	Kec. Cibalong
	Mening katnya Kualita s Penyel nggaran Pemer intahan Tingkat Kecam atan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	10 0	67.973.400	99	67.623.350	10 0	116.826.30 0	33,69	39.362.00 0	77,03	89.995.00 0	-	-	-	77,03	89.995.00 0	10 0	129.357.00 0	110,73 %	Kec. Cibalong
		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10 0	57.000.000	10 0	57.000.000	10 0	106.879.30 0	35,43	37.872.00 0	78,38	83.776.50 0	-	-	-	78,38	83.776.50 0	10 0	121.648.50 0	113,82 %	Kec. Cibalong
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara	10 0	57.000.000	10 0	57.000.000	10 0	56.879.300	26,96	15.333.00 0	59,56	33.876.50 0	-	-	-	59,56	33.876.50 0	10 0	49.209.500	86,52 %	Kec. Cibalong



	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
	Harmonisasi Hubungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	0,00	-	100	50.000.000	45,08	22.539.000	99,80	49.900.000	-	-	-	99,80	49.900.000	100	72.439.000	144,88%	Kec. Cibalong
	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	10.973.400	97	10.623.350	100	9.947.000	14,98	1.490.000	62,52	6.218.500	-	-	-	62,52	6.218.500	100	7.708.500	77,50%	Kec. Cibalong
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100	10.973.400	97	10.623.350	100	9.947.000	14,98	1.490.000	62,52	6.218.500	-	-	-	62,52	6.218.500	100	7.708.500	77,50%	Kec. Cibalong
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100	100.000.000	65	65.025.000	100	100.000.000	24,23	24.229.800	62,83	62.828.300	-	-	-	62,83	62.828.300	100	87.058.100	87,06%	Kec. Cibalong
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	100	100.000.000	65	65.025.000	100	100.000.000	24,23	24.229.800	62,83	62.828.300	-	-	-	62,83	62.828.300	100	87.058.100	87,06%	Kec. Cibalong
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	100	-	0,00	Kec. Cibalong	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100	100.000.000	65	65.025.000	100	100.000.000	24,23	24.229.800	62,83	62.828.300	-	-	-	62,83	62.828.300	100	87.058.100	87,06%	Kec. Cibalong
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100	40.225.000	96	38.623.000	100	39.306.600	15,55	6.111.900	73,13	28.743.000	-	-	-	73,13	28.743.000	100	34.854.900	88,67%	Kec. Cibalong
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan	100	40.225.000	96	38.623.000	100	39.306.600	15,55	6.111.900	73,13	28.743.000	-	-	-	73,13	28.743.000	100	34.854.900	88,67%	Kec. Cibalong





		Pengawasan Pemerintahan Desa	dan Pengawasan Pemerintahan Desa																			
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100	8.883.000	98	8.731.000	100	4.498.200	16,53	743.700	39,21	1.763.800	-	-	-	39,21	1.763.800	100	2.507.500	55,74%	Kec. Cibalong
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-	0,00	-	100	20.000.000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	0,00%	Kec. Cibalong
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	19.570.000	-	-	-	0,00	19.570.000	100	19.570.000	0,00	Kec. Cibalong
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	100	23.048.000	94	21.598.000	100	4.142.000	20,04	830.000	43,96	1.821.000	-	-	-	43,96	1.821.000	100	2.651.000	64,00%	Kec. Cibalong
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	100	8.294.000	100	8.294.000	100	10.666.400	42,55	4.538.200	52,39	5.588.200	-	-	-	52,39	5.588.200	100	10.126.400	94,94%	Kec. Cibalong

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

Faktor pendorong pencapaian kinerja :

Faktor penghambat :

Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah kabupaten Garut berikutnya

Sumber : Pengolahan Data Kecamatan Cibalong, 2023



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 :

1. Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh Program adalah 29,79%.
2. Capaian kinerja dan anggaran paling rendah adalah program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yaitu 25,99%
3. Capaian kinerja dan anggaran paling tinggi adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu 89,00%
4. Faktor-faktor penyebab rendahnya capaian kinerja dan anggaran pada beberapa program diantaranya adanya program dan kegiatan masih dilaksanakan sampai dengan triwulan III dan IV.
5. Faktor-faktor penyebab tingginya capaian kinerja dan anggaran pada beberapa program diantaranya dikarenakan indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan perencanaan. Disamping itu sebagian besar indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
6. Implikasi yang timbul terhadap program yang capaian kinerja dan anggarannya masih rendah, perlu adanya percepatan pencairan anggaran untuk mencapai target sesuai dengan yang telah direncanakan.

### **2.2.3. Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) & Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta Proyek Strategis Nasional (*Stunting*)**

Adapun dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2023 beserta realisasi capaian SPM serta program yang mendukung pencapaian SPM disajikan pada tabel 2.8

**Tabel 2.8**

#### **Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian SPM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2023**

Capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal)

❖ Urusan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

<b>1. SPM SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>						
No	Aktifitas	Indikator	Target	Capaian	Satuan Tugas	Program
1	Pelayanan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%		Bappeda	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Pelayanan	Jumlah ASN	100%		Badan	Program



	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	yang memperoleh layanan Fasilitasi dan Koordinasi Administrasi Kepegawaian (Pengajuan Naik Pangkat, Berkala, dll)			Kepegawaian Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3	Pelayanan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

❖ **Urusan Sub Bagian Keuangan dan BMD**

<b>2. SPM SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BMD</b>						
No	Aktifitas	Indikator	Target	Capaian	Satuan Tugas	Program
1	Pelayanan Sub Bagian Keuangan dan BMD	Jumlah Orang yang menerima layanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %		BPKAD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Pelayanan Sub Bagian Keuangan dan BMD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 %		BPKAD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



❖ **Urusan Pemerintahan**

<b>3. SPM PEMERINTAHAN</b>						
No	Aktifitas	Indikator	Target	Capaian	Satuan Tugas	Program
1	Pelayanan Pemerintahan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan PBB, AJB, Ahli Waris, dll	100%		Badan Pendapatan Daerah	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Pelayanan Pemerintahan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Fasilitasi dan Koordinasi Administrasi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dll	100%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3	Pelayanan Pemerintahan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Fasilitasi Kegiatan PHBN, dan Koordinasi Forkpimcam	100%			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

❖ **Urusan Pelayanan**

<b>4. SPM PELAYANAN</b>						
No	Aktifitas	Indikator	Target	Capaian	Satuan Tugas	Program
1	Pelayanan Publik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Rekomendasi Surat Keterangan Pindah/Data ng antar Desa/ Kecamatan, Kabupaten/P rovinsi, E-KTP, KK	100%		Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Pelayanan Publik	Jumlah Warga Negara yang	100%			Program Penyelenggaraan



		memperoleh layanan Legalisasi Surat Keterangan lainnya (PATEN)				Pemerintah an dan Pelayanan Publik
--	--	--	--	--	--	------------------------------------

❖ **Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

<b>5.SPM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>						
No	Aktifitas	Indikator	Target	Capaian	Satuan Tugas	Program
1	Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Warga, Desa dan Lembaga Desa yang memperoleh layanan Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%		Bappeda, PUPR, DPMD, Perkim, Dinas LH, dll	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
2	Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Desa yang memperoleh layanan Fasilitasi Penyusunan RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDes, Rekomendasi Pencairan Dana Alokasi Desa	100%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

❖ **Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

<b>6. SPM TRANTIBUMLINMAS</b>						
No	Aktifitas	Indikator	Target	Capaian	Satuan Tugas	Program
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%		Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
2	Pelayanan	Jumlah	100%		Badan	Program



	n informasi rawan bencana	Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			Penanggulangan Bencana Daerah	Penanggulangan Bencana
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%		Dinas Pemadam Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

❖ **Urusan Kesejahteraan Masyarakat**

<b>7.SPM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>						
N o	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Satuan Tugas	Program
1	Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layFasilitasi dan Monev Bantuan Sosial, BPNT, PKH, SKTM, dll	100%		Dinas Sosial, BAZNAS, BPJS	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sumber: Data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar capain SPM telah dapat mencapai target, namun masih terdapat jenis pelayanan yang belum mencapai target, adapun capaian SPM yang masih tergolong sangat rendah adalah pada jenis pelayanan Seksi Kesejahteraan Masyarakat Untuk tujuan dan target SDGs yang tidak terkait dengan area SPM tidak diuraikan lebih lanjut dalam dokumen ini, karena tidak ada perubahan target. *Stunting* menjadi salah satu proyek strategis nasional, seiring dengan hal tersebut upaya Kabupaten Garut dalam menurunkan angka prevalensi *stunting* adalah dengan dibentuknya Tim Percepatan Penurunan *Stunting* melalui penerbitan Keputusan Bupati Garut Nomor 440/KEP.189-BAPPEDA/2022, serta diterbitkannya Program TOSS (Temukan, Obati, Sayangi balita *Stunting*) guna mengatasi *stunting* di Kabupaten Garut. Program TOSS ini merupakan program lanjutan setelah BPS (Bulan Penimbangan *Stunting*) yang telah berjalan selama bulan Juni tahun 2022 dalam rangka mengobati balita *stunting* serta mencegah timbulnya kasus *stunting* baru di Kabupaten Garut. Dengan program ini diharapkan dapat menurunkan angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Garut yang sekarang berada pada angka 15,6 % menjadi berada dibawah rata-rata nasional yaitu 14%. Pemkab Garut berhasil menurunkan angka prevalensi *stunting* menjadi 23,6 % pada tahun 2022, yang merupakan penurunan tertinggi kedua di Jawa Barat. Melalui gerakan bersama bulan pencarian *stunting*, pemberian makanan tambahan, pengobatan penyakit penyerta, pemantauan tumbuh kembang, peningkatan pola asuh, peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan serta kolaborasi stakeholder bapak asuh.

### **2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibalong**

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, Sumber Daya Manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

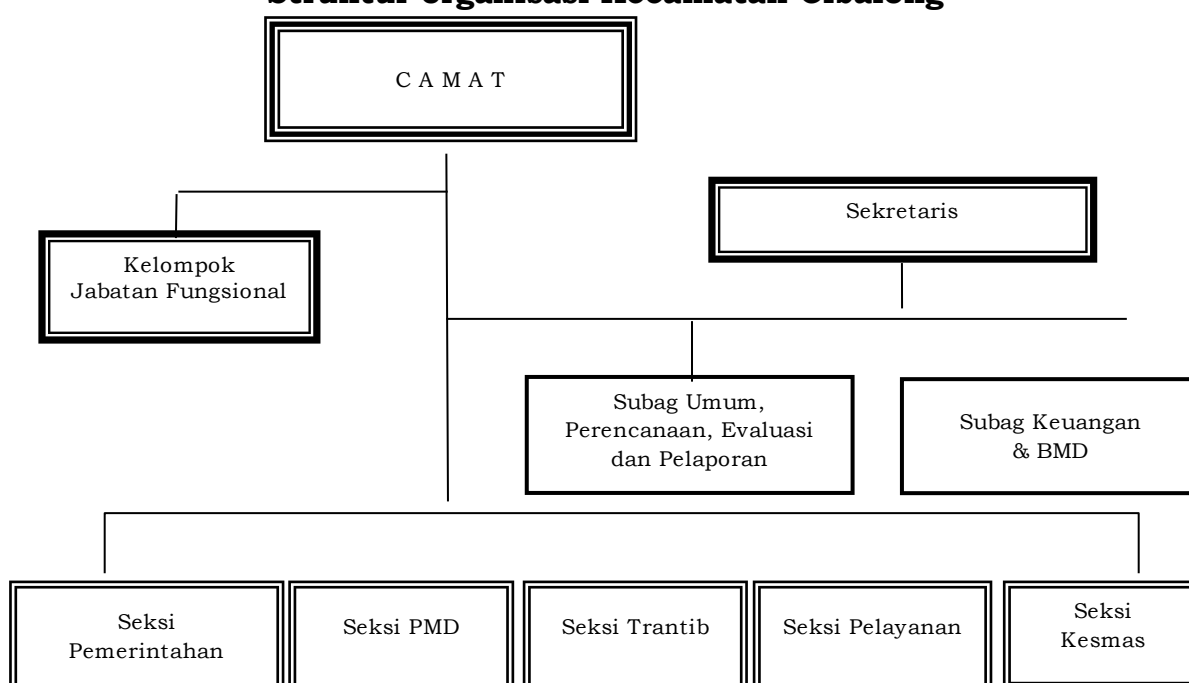
Kecamatan Cibalong sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih





banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cibalong Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cibalong berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235) maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan masing masing sesuai tupoksi serta norma dan standar pelayanan perannangkat daerah yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Gambar 2.1**  
**Struktur organisasi Kecamatan Cibalong**



Sumber : PPID Kecamatan Cibalong, 2023

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja Program dan kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat disajikan tabel 2.9 sebagai berikut :



Tabel 2.9.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cibalong  
Provinsi/Kabupaten/Kota Garut

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM			80	81	82	83	85	n/a	81,64	81,10	83	85	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			80	81	81,5	82	83	100%	100%	81,50	82	83	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan			80%	85%	90%	95%	100%	80	85	85,00	0,95	100%	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan			C	CC	CC	B	BB	C	CC	55,96	B	BB	

Sumber : Pengolahan Data Kecamatan Cibalong, 2023



#### **2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam suatu perencanaan karena dampaknya yang signifikan di masa datang, dari gambaran umum permasalahan yang timbul di Kecamatan Cibalong, maka permasalahan pokok pada pembangunan adalah; (1) Masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial; (2) Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia; (3) Masih belum optimalnya pelayanan infrastruktur; (4) Belum optimalnya kinerja pelayanan publik kepada masyarakat, (5) Belum Optimalnya tingkat penanganan Kesehatan.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II tahun 2023, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa,
2. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
3. Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
4. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat
5. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan public
6. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa
7. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.
8. Belum optimalnya penanggulangan AKI/AKB.
9. Belum optimalnya penanggulangan Stunting.
10. Belum optimalnya penguatan demokrasi.

Dalam rangka menyikapi isu-isu Permasalahan di Kecamatan Cibalong, ditentukan langkah-langkah penting sebagai berikut :

##### **1. Pemanfaatan**

Peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan;



## 2. **Optimalisasi**

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility ( CSR )*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merata di segala bidang;

## 3. **Pelayanan Prima.**

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normative harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

## 4. **Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.**

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesioanal dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat. dengan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi masyarakat, membangun akuntabilitas kepemerintahan yang bertanggung jawab

## 5. **Inovasi dan Kolaborasi**

Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan



pelayanan publik, kualitas hidup, dan berkelanjutan, dilakukan antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku untuk memanfaatkan potensi dan peluang dalam menjawab permasalahan dan tantangan.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI);
2. Peningkatan Pelayanan Publik, moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender, kekerasan pada perempuan dan pemenuhan hak anak;
3. Peningkatan Kapasitas SDM;
4. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;
5. Penanganan kebencanaan baik alam maupun non alam
6. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya;
7. Permasalahan pokok yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah, Sumber Daya Manusia yang terbatas, Sarana dan Prasarana yang belum memadai, angka kemiskinan yang relative tinggi, dan tata kelola pemerintahan lintas sektor yang belum optimal.

Adapun hambatan dalam menanggulangi isu-isu strategis yang berkembang selama ini diantaranya :

1. Belum meratanya kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan di tiap desa.;
2. Minimnya sarana prasarana penunjang kegiatan;
3. Belum optimalnya implementasi SOP;
4. Pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada kurang update;
5. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik;
6. Keterbatasan lapangan pekerjaan;
7. Minimnya sinkronisasi data dalam implementasi program dan kegiatan;
8. Masih kurangnya koordinasi instansi yang terkait dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
9. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang Stunting;
10. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang demokrasi.



## 2.5. Review Terhadap Rancangan Perubahan RENJA

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibalong serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yang merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan acuan bagi penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Dalam rangka *review* terhadap Rancangan Perubahan RKPD maka dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja.

Proses review terhadap Rancangan Perubahan RKPD dilakukan untuk mengidentifikasi kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan pada perubahan Renja dengan arahan Rancangan Perubahan RKPD. Proses perbandingan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Cibalong Tahun 2023 menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut:

1. Jumlah bidang urusan pemerintahan antara Rancangan Perubahan RKPD Kecamatan Cibalong Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Cibalong Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 1 bidang urusan yaitu unsur kewilayahan kecamatan;
2. Jumlah program antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Cibalong Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 06 program, 16 kegiatan dan 37 kegiatan dari total 42 Sub kegiatan yaitu :
  - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
  - 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
  - 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;



- 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa..
3. Jumlah kegiatan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Cibalong Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 16 kegiatan, terdiri dari 37 Sub kegiatan;
4. Kebutuhan dana/pagu Indikatif yang tercantum pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 4.427.239.017,00 telah sesuai dengan kebutuhan dana/pagu indikatif hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 4.427.239.017,00. Secara kronologis, pagu indikatif Renja Kecamatan Cibalong Tahun 2023 sebelum perubahan mencapai sebesar Rp. 19.194.510.841,00 dan mengalami penyesuaian sebesar Rp. 217.042.948,00 pada APBD Tahun 2023 menjadi Rp. 4.210.196.069,00, dan hasil analisis kebutuhan pagu indikatif pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 mencapai sebesar Rp. 4.210.196.069,00 atau berkurang Rp. 217.042.948,00 dari anggaran pada APBD Tahun 2023.
5. Sesuai Hasil Analisis Kebutuhan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan indikator kinerja sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.





Tabel 2.10.  
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023  
Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>KECAMATAN CIBALONG</b>					<b>4.427.239.017</b>					<b>4.427.239.017</b>	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Cibalong	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	3.920.940.317	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Cibalong	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	3.945.383.317	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kec. Cibalong	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	21.929.200	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kec. Cibalong	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	14.129.200	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Cibalong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	2.814.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Cibalong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	1.414.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Cibalong	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	3.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Cibalong	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1.800.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Cibalong	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	3.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Cibalong	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1.800.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Cibalong	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	-	3.400.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Cibalong	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	-	1.800.000	



			Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Cibalong	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	3.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Cibalong	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	1.800.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Cibalong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	2.814.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Cibalong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	2.814.800	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Cibalong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	2.699.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Cibalong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	2.699.600	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kec. Cibalong	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	1.630.599.685	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kec. Cibalong	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	1.627.619.685	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Cibalong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	1.624.794.085	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Cibalong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	1.624.794.085	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Cibalong	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	5.805.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Cibalong	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	2.825.600	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Cibalong	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100	8.986.600	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Cibalong	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100	8.986.600	



			Perangkat Daerah					Perangkat Daerah			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Cibalong	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan	100	8.986.600	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Cibalong	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan	100	8.986.600	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Cibalong	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	100	-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Cibalong	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	100	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Cibalong	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Cibalong	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	-	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kec. Cibalong	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	164.042.932	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kec. Cibalong	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	149.447.132	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Cibalong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	5.747.800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Cibalong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	5.747.800	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Cibalong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	28.244.900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Cibalong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	52.494.900	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Cibalong	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	16.167.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Cibalong	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	16.167.500	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Cibalong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	7.744.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Cibalong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	7.744.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Cibalong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	5.692.800	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Cibalong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	5.692.800	



Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Cibalong	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100	32.332.800	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Cibalong	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100	19.287.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Cibalong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	38.800.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Cibalong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	13.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Cibalong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	29.313.132	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Cibalong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	29.313.132
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kec. Cibalong	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2.000.000.000	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kec. Cibalong	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2.049.818.800
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Cibalong	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Cibalong	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100	-
Pengadaan Alat Besar	Kec. Cibalong	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	100	-	Pengadaan Alat Besar	Kec. Cibalong	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	100	-
Pengadaan Mebel	Kec. Cibalong	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	-	Pengadaan Mebel	Kec. Cibalong	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	49.818.800
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kec. Cibalong	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	100	-	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kec. Cibalong	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	100	-
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Cibalong	Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan	100	2.000.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Cibalong	Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan	100	2.000.000.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Cibalong	Jumlah peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan	100	-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Cibalong	Jumlah peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan	100	-
Penyediaan peralatan rumah tangga	Kec. Cibalong	Jumlah peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan	100	-	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kec. Cibalong	Jumlah peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan	100	-



	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Cibalong	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Cibalong	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kec. Cibalong	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	67.391.900	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kec. Cibalong	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	67.391.900
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Cibalong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	39.102.900	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Cibalong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	39.102.900
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Cibalong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	16.289.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Cibalong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	16.289.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kec. Cibalong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	12.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kec. Cibalong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	12.000.000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kec. Cibalong	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	27.990.000	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kec. Cibalong	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	27.990.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Cibalong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	27.990.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Cibalong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	27.990.000



	Pemeliharaan Mebel	Kec. Cibalong	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	Pemeliharaan Mebel	Kec. Cibalong	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Cibalong	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Cibalong	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Cibalong	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100	154.212.800	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Cibalong	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100	145.722.800
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Kec. Cibalong	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	123.937.400	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Kec. Cibalong	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	115.447.400
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Cibalong	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	123.937.400	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Cibalong	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	115.447.400
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Kec. Cibalong	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	30.275.400	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Kec. Cibalong	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	30.275.400
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kec. Cibalong	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	100	30.275.400	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kec. Cibalong	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	100	30.275.400
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Cibalong	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di	-	-	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Cibalong	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di	-	-



			Wilayah Kecamatan					Wilayah Kecamatan			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Cibalong	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100	80.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Cibalong	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100	80.000.000	
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Kec. Cibalong	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	30.000.000	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Kec. Cibalong	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	30.000.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Cibalong	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	15.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Cibalong	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	15.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Cibalong	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	15.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Cibalong	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	15.000.000	
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Kec. Cibalong	Jumlah koordinasi pemberdayaan masyarakat	100	50.000.000	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Kec. Cibalong	Jumlah koordinasi pemberdayaan masyarakat	100	50.000.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Cibalong	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	100	20.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Cibalong	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	100	20.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kec. Cibalong		-	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kec. Cibalong		-	-	
	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kec. Cibalong	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa	100	30.000.000	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kec. Cibalong	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa	100	30.000.000	





			dan Kelurahan					dan Kelurahan			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Cibalong	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100	132.779.300	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Cibalong	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100	116.826.300	
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Kec. Cibalong	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	114.779.300	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Kec. Cibalong	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	106.879.300	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Cibalong	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100	64.779.300	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Cibalong	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100	56.879.300	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Cibalong	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100	50.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Cibalong	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100	50.000.000	
	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Kec. Cibalong	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	18.000.000	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Kec. Cibalong	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	9.947.000	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Cibalong	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	100	18.000.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Cibalong	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	100	9.947.000	



			Indonesia					Indonesia				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Cibalong	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100	100.000.000			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Cibalong	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100	100.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Cibalong	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	100	100.000.000			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Cibalong	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	100	100.000.000
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Cibalong	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	-			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Cibalong	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	-
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Cibalong	Jumlah dokumen Tugas Forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100	100.000.000			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Cibalong	Jumlah dokumen Tugas Forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100	100.000.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Cibalong	Persentase Desa Berkinerja Baik	100	39.306.600			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Cibalong	Persentase Desa Berkinerja Baik	100	39.306.600
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Cibalong	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	39.306.600			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Cibalong	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	39.306.600



	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Cibalong	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100	4.498.200	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Cibalong	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100	4.498.200	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Cibalong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	100	20.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Cibalong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	100	20.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Cibalong	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Cibalong	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Cibalong	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	100	4.142.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Cibalong	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	100	4.142.000	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Cibalong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	100	10.666.400	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Cibalong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	100	10.666.400	

Sumber : Pengolahan Data Kecamatan Cibalong, 2023



Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Cibalong diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan program. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table 2.11 berikut:



**Tabel 2.11.**  
**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokas i		Sumb er Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasio nal				Daer ah		
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	3.920.940. 317	2.119.869. 148	2.003.467. 056	3.920.940. 317	3.728.340. 369	3.920.940. 317	3.728.340. 369	3.728.340. 369	Kec. Cibalong	Dana Aloka si Umu m (DAU)			Desa Karyam ukti Kec. Cibalon g	100 %	4.101.174. 406	Kec. Cibalong		
7 1 1	### ##	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.929.20 0	17.136.00 0	17.136.00 0	21.929.20 0	14.129.20 0	21.929.20 0	14.129.20 0	14.129.20 0	Kec. Cibalong	Dana Aloka si Umu m (DAU)			Desa Karyam ukti Kec. Cibalon g	100 %	15.542.12 0	Kec. Cibalong	
7 1 1	02.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.814.800	17.136.000	17.136.000	2.814.800	1.414.800	2.814.800	1.414.800	1.414.800	Kec. Cibalong	Dana Aloka si Umu m (DAU)			Desa Karyam ukti Kec. Cibalon g	100 %	1.556.280	Kec. Cibalong
7 1 1	02.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.400.000			3.400.000	1.800.000	3.400.000	1.800.000	1.800.000	Kec. Cibalong	Dana Aloka si Umu m (DAU)			Desa Karyam ukti Kec. Cibalon g	100 %	1.980.000	Kec. Cibalong
7 1 1	02.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.400.000			3.400.000	1.800.000	3.400.000	1.800.000	1.800.000	Kec. Cibalong	Dana Aloka si Umu m (DAU)			Desa Karyam ukti Kec. Cibalon g	100 %	1.980.000	Kec. Cibalong
7 1 1	02.0 1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3.400.000			3.400.000	1.800.000	3.400.000	1.800.000	1.800.000	Kec. Cibalong	Dana Aloka si Umu m (DAU)			Desa Karyam ukti Kec. Cibalon g	100 %	1.980.000	Kec. Cibalong
7 1 1	02.0 1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3.400.000			3.400.000	1.800.000	3.400.000	1.800.000	1.800.000	Kec. Cibalong	Dana Aloka si Umu			Desa Karyam ukti Kec.	100 %	1.980.000	Kec. Cibalong





					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)			Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100 %	-	Kec. Cibalong
7	1	1	###	###	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>164.042.932</b>	<b>179.563.055</b>	<b>179.561.930</b>	<b>164.042.932</b>	<b>125.197.132</b>	<b>164.042.932</b>	<b>125.197.132</b>	<b>125.197.132</b>	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)			Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100 %	137.716.845	Kec. Cibalong
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.747.800	6.258.000	6.258.000	5.747.800	5.747.800	5.747.800	5.747.800	5.747.800	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)			Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100 %	6.322.580	Kec. Cibalong
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28.244.900	41.430.400	41.429.800	28.244.900	28.244.900	28.244.900	28.244.900	28.244.900	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)			Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100 %	31.069.390	Kec. Cibalong
7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16.167.500	14.138.155	14.137.630	16.167.500	16.167.500	16.167.500	16.167.500	16.167.500	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)			Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100 %	17.784.250	Kec. Cibalong
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7.744.000	9.116.500	9.116.500	7.744.000	7.744.000	7.744.000	7.744.000	7.744.000	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)			Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100 %	8.518.400	Kec. Cibalong
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5.692.800	5.370.000	5.370.000	5.692.800	5.692.800	5.692.800	5.692.800	5.692.800	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)			Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100 %	6.262.080	Kec. Cibalong
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.332.800	39.170.000	39.170.000	32.332.800	19.287.000	32.332.800	19.287.000	19.287.000	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)			Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100 %	21.215.700	Kec. Cibalong
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.800.000	64.080.000	64.080.000	38.800.000	13.000.000	38.800.000	13.000.000	13.000.000	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)			Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100 %	14.300.000	Kec. Cibalong
7	1	1	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	29.313.132			29.313.132	29.313.132	29.313.132	29.313.132	29.313.132	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum			Desa Karyamukti Kec.	100 %	32.244.445	Kec. Cibalong





					Dinamis pada SKPD																	
7	1	1	### ##		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>185.804.130</b>	<b>184.972.780</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)			Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	2.200.000.000	Kec. Cibalong
7	1	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-			-	-	-	-	-	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)			Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	-	Kec. Cibalong
7	1	1	02.07		Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	-			-	-	-	-	-	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)			Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	-	Kec. Cibalong
7	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-			-	-	-	-	-	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)			Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	-	Kec. Cibalong
7	1	1	02.07	6	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	97.281.630	96.981.550	-	-	-	-	-	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)			Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	-	Kec. Cibalong
7	1	1	02.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan	2.000.000.000	88.522.500	87.991.230	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)			Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	2.200.000.000	Kec. Cibalong
7	1	1	02.07		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan	-			-	-	-	-	-	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)			Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	-	Kec. Cibalong
7	1	1	02.07		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan	-			-	-	-	-	-	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)			Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	-	Kec. Cibalong
7	1	1	02.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-			-	-	-	-	-	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)			Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	-	Kec. Cibalong
7	1	1	### ##		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang</b>	<b>67.391.900</b>	<b>50.915.012</b>	<b>44.229.714</b>	<b>67.391.900</b>	67.391.900	<b>67.391.900</b>	67.391.900	67.391.900	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum			Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	74.131.090	Kec. Cibalong



					Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah									(DAU)			g			
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	39.102.900	22.032.000	15.346.714	39.102.900	39.102.900	39.102.900	39.102.900	39.102.900	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)		Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	43.013.190	Kec. Cibalong
7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16.289.000	7.210.000	7.210.000	16.289.000	16.289.000	16.289.000	16.289.000	16.289.000	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)		Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	17.917.900	Kec. Cibalong
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.000.000	21.673.012	21.673.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)		Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	13.200.000	Kec. Cibalong
7	1	1	###		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>27.990.000</b>	<b>19.536.900</b>	<b>19.223.700</b>	<b>27.990.000</b>	27.990.000	<b>27.990.000</b>	27.990.000	27.990.000	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)		Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	30.789.000	Kec. Cibalong
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27.990.000	19.536.900	19.223.700	27.990.000	27.990.000	27.990.000	27.990.000	27.990.000	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)		Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	30.789.000	Kec. Cibalong
7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)		Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	-	Kec. Cibalong
7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)		Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	-	Kec. Cibalong
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh	154.212.800	105.476.700	105.306.650	154.212.800	145.722.800	154.212.800	145.722.800	145.722.800	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)		Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	160.295.080	Kec. Cibalong



7	1	2	### ##		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	123.937.400	83.803.400	83.633.350	123.937.400	115.447.400	123.937.400	115.447.400	115.447.400	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)		Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	126.992.140	Kec. Cibalong
7	1	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	123.937.400	83.803.400	83.633.350	123.937.400	115.447.400	123.937.400	115.447.400	115.447.400	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)		Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	126.992.140	Kec. Cibalong
7	1	2	### ##		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	30.275.400	21.673.300	21.673.300	30.275.400	30.275.400	30.275.400	30.275.400	30.275.400	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)		Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	33.302.940	Kec. Cibalong
7	1	2	02.02	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	30.275.400	21.673.300	21.673.300	30.275.400	30.275.400	30.275.400	30.275.400	30.275.400	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)		Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	33.302.940	Kec. Cibalong
7	1	2	02.02	1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)		Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	-	Kec. Cibalong
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	80.000.000	14.601.400	14.461.400	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)		Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	88.000.000	Kec. Cibalong
7	1	3	### ##		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30.000.000	14.601.400	14.461.400	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)		Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	33.000.000	Kec. Cibalong
7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	15.000.000	6.185.400	6.185.400	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)		Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	16.500.000	Kec. Cibalong



7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	di Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.000.000	8.416.000	8.276.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)			Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	16.500.000	Kec. Cibalong
7	1	3	###	###	<b>Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah koordinasi pemberdayaan masyarakat</b>	<b>50.000.000</b>	-	-	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)			Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	55.000.000	Kec. Cibalong
7	1	3	02.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Jumlah lembaga masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000.000			20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)			Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	22.000.000	Kec. Cibalong
7	1	3	###	###	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		-			-	-	-	-	-	-	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)			Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	-	Kec. Cibalong
7	1	3	02.05	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	30.000.000			30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)			Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	33.000.000	Kec. Cibalong
7	1	4			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</b>	<b>132.779.300</b>	<b>67.973.400</b>	<b>67.623.350</b>	<b>132.779.300</b>	<b>116.826.300</b>	<b>132.779.300</b>	<b>116.826.300</b>	<b>116.826.300</b>	<b>116.826.300</b>	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)			Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	128.508.930	Kec. Cibalong
7	1	4	###	###	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<b>114.779.300</b>	<b>57.000.000</b>	<b>57.000.000</b>	<b>114.779.300</b>	106.879.300	<b>114.779.300</b>	106.879.300	106.879.300	106.879.300	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)			Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	117.567.230	Kec. Cibalong
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	64.779.300	57.000.000	57.000.000	64.779.300	56.879.300	64.779.300	56.879.300	56.879.300	56.879.300	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)			Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	62.567.230	Kec. Cibalong
7	1	4	02.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi	50.000.000			50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum			Desa Karyamukti Kec.	100%	55.000.000	Kec. Cibalong



					Tokoh Masyarakat	Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								m (DAU)			Cibalong								
7	1	4	### ##		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	18.000.000	10.973.400	10.623.350	18.000.000	9.947.000	18.000.000	9.947.000	9.947.000	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)	Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	10.941.700					Kec. Cibalong	
7	1	4	02.0 2	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	18.000.000	10.973.400	10.623.350	18.000.000	9.947.000	18.000.000	9.947.000	9.947.000	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)	Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	10.941.700					Kec. Cibalong	
7	1	5			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat</b>	100.000.000	65.200.000	65.025.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)	Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	110.000.000					Kec. Cibalong
7	1	5	### ##		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	100.000.000	65.200.000	65.025.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)	Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	110.000.000					Kec. Cibalong	
7	1	5	02.0 1	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)	Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	-					Kec. Cibalong	
7	1	5	02.0 1	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi	Jumlah dokumen Tugas Forum	100.000.000	65.200.000	65.025.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kec. Cibalong	Dana Alokasi	Desa Karyamukti	100%	110.000.000					Kec. Cibalong	



					Pimpinan di Kecamatan	koordinasi Pimpinan di Kecamatan												Kec. Cibalong						
7	1	6			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Berkinerja Baik</b>	39.306.600	40.225.000	38.623.000	39.306.600	39.306.600	39.306.600	39.306.600	39.306.600	39.306.600	39.306.600		Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)	Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	43.237.260	Kec. Cibalong	
7	1	6	### ##		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	39.306.600	40.225.000	38.623.000	39.306.600	39.306.600	39.306.600	39.306.600	39.306.600	39.306.600	39.306.600		Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)	Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	43.237.260	Kec. Cibalong	
7	1	6	02.0 1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.498.200	8.883.000	8.731.000	4.498.200	4.498.200	4.498.200	4.498.200	4.498.200	4.498.200	4.498.200		Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)	Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	4.948.020	Kec. Cibalong	
7	1	6	02.0 1	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	20.000.000			20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000		Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)	Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	22.000.000	Kec. Cibalong	
7	1	6	02.0 1		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-			-	-	-	-	-	-	-		Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)	Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	-	Kec. Cibalong	
7	1	6	02.0 1	1 2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakatan	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakatan	4.142.000	23.048.000	21.598.000	4.142.000	4.142.000	4.142.000	4.142.000	4.142.000	4.142.000	4.142.000		Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)	Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	4.556.200	Kec. Cibalong	
7	1	6	02.0 1	1 3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	10.666.400	8.294.000	8.294.000	10.666.400	10.666.400	10.666.400	10.666.400	10.666.400	10.666.400	10.666.400		Kec. Cibalong	Dana Alokasi Umum (DAU)	Desa Karyamukti Kec. Cibalong	100%	11.733.040	Kec. Cibalong	
<b>JUMLAH :</b>							4.427.239.017	2.413.345.648	2.294.506.456	4.427.239.017	4.210.196.069	4.427.239.017	4.210.196.069	4.427.239.017	4.210.196.069	4.210.196.069								

Sumber : Pengolahan Data Kecamatan Cibalong, 2023



Tabel 2.12.  
Rancangan RKPD Tahun 2023  
Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Program Awal	Rencana Tahun 2023 Pagu Indikatif (Rp.)		Keterangan/ Selisih
			Sebelum	Sesudah	
	<b>KECAMATAN CIBALONG</b>	<b>4.427.239.017</b>	<b>4.210.196.069</b>	<b>4.210.196.069</b>	Tetap
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.920.940.317</b>	<b>3.728.340.369</b>	<b>3.728.340.369</b>	Tetap
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>21.929.200</b>	<b>14.129.200</b>	<b>14.129.200</b>	Tetap
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.814.800	1.414.800	1.414.800	Tetap
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.400.000	1.800.000	1.800.000	Tetap
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.400.000	1.800.000	1.800.000	Tetap
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.400.000	1.800.000	1.800.000	Tetap
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.400.000	1.800.000	1.800.000	Tetap
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.814.800	2.814.800	2.814.800	Tetap
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.699.600	2.699.600	2.699.600	Tetap
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.630.599.685</b>	<b>1.484.645.537</b>	<b>1.484.645.537</b>	Tetap
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.624.794.085	1.481.819.937	1.481.819.937	Tetap
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.805.600	2.825.600	2.825.600	Tetap
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>8.986.600</b>	<b>8.986.600</b>	<b>8.986.600</b>	Tetap
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8.986.600	8.986.600	8.986.600	Tetap
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Tetap
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>164.042.932</b>	<b>125.197.132</b>	<b>149.447.132</b>	Tetap
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.747.800	5.747.800	5.747.800	Tetap
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.244.900	28.244.900	52.494.900	Bertambah 24.250.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.167.500	16.167.500	16.167.500	Tetap





	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.744.000	7.744.000	7.744.000	Tetap
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.692.800	5.692.800	5.692.800	Tetap
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.332.800	19.287.000	19.287.000	Tetap
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.800.000	13.000.000	13.000.000	Tetap
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	29.313.132	29.313.132	29.313.132	Tetap
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>1.975.750.000</b>	Berkurang 200.290.819
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Tetap
	Pengadaan Mebel	-	-	176.040.819	Perubahan
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Tetap
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000.000	2.000.000.000	1.799.709.181	Berkurang 200.290.819
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Tetap
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>67.391.900</b>	<b>67.391.900</b>	<b>67.391.900</b>	Tetap
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.102.900	39.102.900	39.102.900	Tetap
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.289.000	16.289.000	16.289.000	Tetap
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Tetap
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>27.990.000</b>	<b>27.990.000</b>	<b>27.990.000</b>	Tetap
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.990.000	27.990.000	27.990.000	Tetap
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Tetap
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	154.212.800	145.722.800	145.722.800	Tetap
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>123.937.400</b>	<b>115.447.400</b>	<b>115.447.400</b>	Tetap
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	123.937.400	115.447.400	115.447.400	Tetap
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak</b>	<b>30.275.400</b>	<b>30.275.400</b>	<b>30.275.400</b>	Tetap



	<b>Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>				
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	30.275.400	30.275.400	30.275.400	Tetap
III	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	80.000.000	80.000.000	80.000.000	Tetap
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	Tetap
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Tetap
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Tetap
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	Tetap
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Tetap
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	Tetap
	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Tetap
IV	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	132.779.300	116.826.300	116.826.300	Tetap
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>114.779.300</b>	<b>106.879.300</b>	<b>106.879.300</b>	Tetap
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	64.779.300	56.879.300	56.879.300	Tetap
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Tetap
	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>18.000.000</b>	<b>9.947.000</b>	<b>9.947.000</b>	Tetap
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	18.000.000	9.947.000	9.947.000	Tetap
VI	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Tetap
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	Tetap



	<b>Penugasan Kepala Daerah</b>				
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	-	-	Tetap
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Tetap
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	39.306.600	39.306.600	39.306.600	Tetap
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>39.306.600</b>	<b>39.306.600</b>	<b>39.306.600</b>	Tetap
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.498.200	4.498.200	4.498.200	Tetap
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Tetap
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4.142.000	4.142.000	4.142.000	Tetap
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	10.666.400	10.666.400	10.666.400	Tetap
	<b>Jumlah ;</b>	<b>4.427.239.017</b>	<b>4.210.196.069</b>	<b>4.210.196.069</b>	Tetap

Sumber : Pengolahan Data Kecamatan Cibalong, 2023



### BAB III

#### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cibalong Tahun 2023 dilakukan dengan mendasarkan pada adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan renja Kecamatan Cibalong Tahun 2023, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan di laksanakan pada tahun 2022, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mempedomani perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 serta perubahan Renstra Kecamatan Cibalong tahun 2019-2024
2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut
3. Mendukung prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Garut
4. Meningkatkan keterssediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membayai pelaksanaan program secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah Penyusunan perubahan renja pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga Perubahan Renstra Kecamatan Cibalong yang secara operasional dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Visi Pembangunan Daerah yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera" Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Bertaqwa** : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila,



diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat;

2. **Maju** : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi;
3. **Sejahtera** : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang.
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
  - b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
  - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
  - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
  - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;



- b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran:
  - a. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
  - b. Meningkatkan kemajuan pembangunan desa;
  - c. Meningkatkan pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
  - d. Meningkatkan kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
  - e. Meningkatkan pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir
4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran:
  - a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
  - b. Meningkatkan ketangguhan terhadap bencana
5. Meningkatkan perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:
  - a. Meningkatkan kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
  - b. Meningkatkan pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
  - c. Meningkatkan realisasi investasi daerah

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik , Pemerataan Pembangunan Dan Daya Saing Daerah Serta Penguatan Demokrasi Untuk Kesejahteraan Masyarakat”** dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integritas dan profesionalisme. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan tema pembangunan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, yaitu :

1. Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
2. Peningkatan dukungan kehidupan beragama, budaya gotong royong, ketentraman dan ketertiban serta politik dan demokrasi;
3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kb, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga;
4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;
5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;



6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;
8. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cibalong senantiasa memperhatikan Lima Arahuan Utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia, dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi, dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi ekonomi, dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pada Lima arahan Pembangunan diatas, serta dengan mengkaji kondisi sosial masyarakat Kabupaten Garut, maka Prioritas Pembangunan Daerah untuk tahun 2023, diarahkan pada:

1. Penurunan Angka Kemiskinan Dan Perluasan Kesempatan Kerja;
2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban Serta Politik Dan Demokrasi;
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, KB, Kesetaraan Gender Dan Pemenuhan Hak Anak Serta Pemuda Dan Olah Raga;





4. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Secara Merata;
5. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan, Pariwisata Dan Jasa Produktif Lainnya;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengurangan Risiko Bencana;
7. Peningkatan Pelayanan Publik Dan Kinerja Aparatur;
8. Peningkatan Investasi Dan Pendapatan Daerah

Atas dasar keselarasan agenda pembangunan dan isu strategis di atas, dengan fokus pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem perlindungan sosial; dan reformasi sistem ketahanan bencana. Sejatinya keberhasilan pembangunan Kabupaten Garut merupakan keberhasilan kolektif dari peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Garut, tentu saja dengan didukung oleh bantuan dari Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi **Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini harus dilakukan secara berkualitas dan lebih produktif sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan program, kegiatan maupun sub kegiatan harus bersifat yang menyentuh masyarakat secara langsung sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
2. Peningkatan investasi di daerah, dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain dengan pola kemitraan guna peningkatan daya saing daerah;
3. Percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi, infrastruktur pedesaan, khususnya untuk mengatasi ketertinggalan wilayah agar perekonomian masyarakat bisa berkembang serta mewujudkan pemerataan pembangunan; serta
4. Membangun komitmen seluruh *stakeholder* baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis, dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan



pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Cibalong mempunyai tujuan :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional dan Amanah'
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan.

Sedangkan yang menjadi indikator tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Cibalong Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan .
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Cibalong Tahun 2023 adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Cibalong Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja**  
**Kecamatan Cibalong**  
**Tahun 2023**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	83
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	82
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	95%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	B

Sumber : Pengolahan Data Sub Bagian Umum Kec. Cibalong

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cibalong Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Substansi pada Perubahan Renja Tahun 2023 diantaranya yaitu adanya penyesuaian berupa penambahan atau pengurangan kegiatan/subkegiatan; perubahan pagu program, kegiatan atau subkegiatan, serta perubahan indikator dan target indikator program, kegiatan atau subkegiatan. Perubahan ini dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran Renstra tahun 2019-2024 melalui prioritas yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2023. Rekapitulasi rencana program dan kegiatan Perubahan Renja Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.2 sebagai berikut :



**Tabel 3.2**  
**Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RENJA**  
**Kecamatan Cibalong Tahun 2023**

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
	<b>KECAMATAN CIBALONG</b>	<b>4.210.196.069</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.728.340.369</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>14.129.200</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.414.800
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.800.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.800.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.800.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.800.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.814.800
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.699.600
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.484.645.537</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.481.819.937
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.825.600
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>8.986.600</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8.986.600
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>125.197.132</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.747.800
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.244.900
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.167.500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.744.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.692.800
	Fasilitas Kunjungan Tamu	19.287.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.000.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	29.313.132
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.000.000.000</b>
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-
	Pengadaan Mebel	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>67.391.900</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.102.900
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.289.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.000.000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>27.990.000</b>



		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.990.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		145.722.800
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>115.447.400</b>
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	115.447.400
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>		<b>30.275.400</b>
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	30.275.400
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		80.000.000
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		<b>30.000.000</b>
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.000.000
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.000.000
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		<b>20.000.000</b>
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>		<b>30.000.000</b>
		Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	30.000.000
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		116.826.300
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>106.879.300</b>
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	56.879.300
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.000.000
	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>		<b>9.947.000</b>
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9.947.000
VI	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100.000.000
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		<b>100.000.000</b>
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100.000.000
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		39.306.600
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>39.306.600</b>
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.498.200
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	20.000.000
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan	4.142.000



		Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	10.666.400
<b>Jumlah :</b>			<b>4.210.196.069</b>

Sumber : Hasil Pengolahan data Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023

Secara garis besar rumusan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah bidang urusan pemerintahan sebanyak 1 bidang urusan yaitu unsur kewilayahan kecamatan.
2. Jumlah program sebanyak 06 program, yaitu :
  - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
  - 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
  - 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
  - 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
3. Jumlah kegiatan sebanyak 16 kegiatan, dari total 37 Sub kegiatan
4. Jumlah sub kegiatan sebanyak 37 kegiatan dari total 42 Sub kegiatan .

Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif untuk rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Cibalong Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 4.427.239.017,00**, dengan kronologis dari pagu indikatif pada Renja Tahun 2023 sebesar Rp. **4.210.196.069,00** mengalami penyesuaian sebesar Rp. **217.042.948,00**, yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Garut. Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tersaji pada tabel berikut:



Tabel 3.3  
Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2023

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Cibalong**

**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Cibalong**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	Kebutuhan Dana/			
		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)			
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>										
7	1	<b>KECAMATAN</b>										
		4.427.239.017	4.427.239.017					4.869.962.919	6,909,073,403			
7	1	1						4.339.921.649	-			
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										
7	1	1	02.01					15.542.120	-			
		<b>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										
7	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.814.800	1.414.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	1.556.280	5,500,000
7	1	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.400.000	1.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	1.980.000	5,500,000
7	1	1	02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	3.400.000	1.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	1.980.000	5,500,000
7	1	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.400.000	1.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat	1 dokumen	1.980.000	5,500,000





											Kecamatan			
7	1	1	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.400.000	1.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	<b>1.980.000</b>	5,500,000	
7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.814.800	2.814.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	<b>3.096.280</b>	5,500,000	
7	1	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.699.600	2.699.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	<b>2.969.560</b>	5,500,000	
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>02.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.630.599.685</b>	<b>1.627.619.685</b>					<b>1.790.381.654</b>	<b>1,937,849,581</b>	
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.624.794.085	1.624.794.085	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	<b>1.787.273.494</b>	1,908,284,078	
7	1	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.805.600	2.825.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	<b>3.108.160</b>	29,565,503	
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>02.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	-	-					-	-	
7	1	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	-	-	
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>02.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>8.986.600</b>	<b>8.986.600</b>					<b>9.885.260</b>	<b>54,825,870</b>	
7	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8.986.600	8.986.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	<b>9.885.260</b>	36,675,870	
7	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				-	18,150,000	
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>02.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>164.042.932</b>	<b>149.447.132</b>					<b>164.391.845</b>	<b>382,106,145</b>	
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	5.747.800	5.747.800	Dana Transfer Umum-Dana		Prosentasi Pelayanan	100 %	<b>6.322.580</b>	58,994,179	



					Bangunan Kantor			Alokasi Umum		Administrasi Perkantoran			
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.244.900	52.494.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	<b>57.744.390</b>	57,744,390
7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.167.500	16.167.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	<b>17.784.250</b>	58,996,387
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.744.000	7.744.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	<b>8.518.400</b>	29,757,970
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.692.800	5.692.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	<b>6.262.080</b>	7,103,184
7	1	1	02.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	32.332.800	19.287.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	<b>21.215.700</b>	68,616,680
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.800.000	13.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	<b>14.300.000</b>	64,713,000
7	1	1	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	29.313.132	29.313.132	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	<b>32.244.445</b>	36,180,355
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>02.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.049.818.800</b>					<b>2.254.800.680</b>	-
7	1	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				-	88,402,600
7	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	-	49.818.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	<b>54.800.680</b>	193,644,900
7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				-	70,379,793
7	1	1	02.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000.000	2.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	<b>2.200.000.000</b>	1,979,680,099
7	1	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				-	143,552,253
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>02.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>67.391.900</b>	<b>67.391.900</b>					<b>74.131.090</b>	<b>158,378,941</b>





					Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			ASLI DAERAH (PAD)		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>80.000.000</b>	<b>80.000.000</b>						<b>88.000.000</b>	-
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>02.01</b>		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>						<b>33.000.000</b>	-
7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.000.000	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	<b>16.500.000</b>	49,037,010	
7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.000.000	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	<b>16.500.000</b>	44,332,750	
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>02.03</b>		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>						<b>22.000.000</b>	<b>55,772,310</b>
7	1	3	02.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	<b>22.000.000</b>	55,772,310	
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>02.05</b>		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>						<b>33.000.000</b>	<b>58,300,000</b>
7	1	3	02.05	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	30.000.000	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	<b>33.000.000</b>	58,300,000	
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>4</b>			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>132.779.300</b>	<b>116.826.300</b>						<b>128.508.930</b>	<b>304,496,979</b>
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>02.01</b>		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>114.779.300</b>	<b>106.879.300</b>						<b>117.567.230</b>	<b>210,128,419</b>
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	64.779.300	56.879.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100 %	<b>62.567.230</b>	113,552,269	
7	1	4	02.01	2	Harmonisasi Hubungan	50.000.000	50.000.000	PENDAPATAN		Prosentase	100 %	<b>55.000.000</b>	96,576,150	



					dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			ASLI DAERAH (PAD)		Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan				
7	1	4	02.02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	18.000.000	9.947.000					10.941.700	94,368,560	
7	1	4	02.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	18.000.000	9.947.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	1 laporan	10.941.700	94,368,560	
7	1	5			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	100.000.000	100.000.000					110.000.000	-	
7	1	5	02.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	100.000.000	100.000.000					110.000.000	-	
7	1	5	02.01	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				-	60,500,000	
7	1	5	02.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100.000.000	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	110.000.000	124,471,490	
7	1	6			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	39.306.600	39.306.600					43.237.260	-	
7	1	6	02.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	39.306.600	39.306.600					43.237.260	-	
7	1	6	02.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.498.200	4.498.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100 %	4.948.020	57,026,816	
7	1	6	02.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	20.000.000	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Prosentase Penyelenggaraan	100 %	22.000.000	20,000,000	



								(PAD)		Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan			
7	1	6	02.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4.142.000	4.142.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100 %	<b>4.556.200</b>	57,966,920
7	1	6	02.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	10.666.400	10.666.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100 %	<b>11.733.040</b>	63,060,360
<b>TOTAL</b>						<b>4.427.239.017</b>	<b>4.427.239.017</b>					<b>4.869.962.919</b>	<b>6,909,073,403</b>

(Sumber : <https://garutkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah> (RKPD perubahan 2023)).



Tabel 3.4  
Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Cibalong  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Cibalong

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
							Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	Kebutuhan Dana/		
							Sebelum	Sesudah						Tolok Ukur	Target
7							<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>								
7	1						<b>4.427.239.017</b>	<b>4.427.239.017</b>						<b>4.869.962.919</b>	<b>6.909.073.403</b>
7	1	1					<b>3.920.940.317</b>	<b>3.945.383.317</b>						<b>4.339.921.649</b>	-
7	1	1	02.01				<b>21.929.200</b>	<b>14.129.200</b>						<b>15.542.120</b>	<b>38.500.000</b>
7	1	1	02.01	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.814.800	1.414.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	1 dokumen		<b>1.556.280</b>	5.500.000
7	1	1	02.01	2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.400.000	1.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	1 dokumen		<b>1.980.000</b>	5.500.000
7	1	1	02.01	3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.400.000	1.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang	1 dokumen		<b>1.980.000</b>	5.500.000





								Umum		Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan				
7	1	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.400.000	1.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	<b>1.980.000</b>	5.500.000	
7	1	1	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.400.000	1.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	<b>1.980.000</b>	5.500.000	
7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.814.800	2.814.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	<b>3.096.280</b>	5.500.000	
7	1	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.699.600	2.699.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	<b>2.969.560</b>	5.500.000	
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>02.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.630.599.685</b>	<b>1.627.619.685</b>					<b>1.790.381.654</b>	<b>#REF!</b>	
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.624.794.085	1.624.794.085	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	<b>1.787.273.494</b>	1.908.284.078	
7	1	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	5.805.600	2.825.600	Dana Transfer		Prosentase Pelayanan	100 %	<b>3.108.160</b>	29.565.503	





								Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi Perkantoran				
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.744.000	7.744.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	<b>8.518.400</b>	29.757.970	
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	5.692.800	5.692.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	<b>6.262.080</b>	7.103.184	
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamunya	32.332.800	19.287.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	<b>21.215.700</b>	68.616.680	
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.800.000	13.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	<b>14.300.000</b>	64.713.000	
7	1	1	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	29.313.132	29.313.132	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	<b>32.244.445</b>	36.180.355	
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>02.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.049.818.800</b>					<b>2.254.800.680</b>	<b>2.915.837.783</b>	
7	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	-	49.818.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	<b>54.800.680</b>	193.644.900	
7	1	1	02.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000.000	2.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	<b>2.200.000.000</b>	1.979.680.099	
7	1	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				-	143.552.253	



7	1	1	02.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>67.391.900</b>	<b>67.391.900</b>						<b>74.131.090</b>	<b>158.378.941</b>
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.102.900	39.102.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %		<b>43.013.190</b>	43.013.190
7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.289.000	16.289.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %		<b>17.917.900</b>	67.417.900
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.000.000	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %		<b>13.200.000</b>	47.947.851
7	1	1	02.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>27.990.000</b>	<b>27.990.000</b>						<b>30.789.000</b>	<b>292.369.408</b>
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.990.000	27.990.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100 %		<b>30.789.000</b>	36.965.379
7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100 %		-	-
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>154.212.800</b>	<b>145.722.800</b>						<b>160.295.080</b>	<b>228.831.020</b>
7	1	2	02.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>123.937.400</b>	<b>115.447.400</b>						<b>126.992.140</b>	<b>157.441.130</b>



7	1	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	123.937.400	115.447.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	<b>126.992.140</b>	157.441.130
7	1	2	02.02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>30.275.400</b>	<b>30.275.400</b>				<b>33.302.940</b>	<b>71.389.890</b>
7	1	2	02.02	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	30.275.400	30.275.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	100 %	<b>33.302.940</b>	71.389.890
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>80.000.000</b>	<b>80.000.000</b>				<b>88.000.000</b>	-
7	1	3	02.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>				<b>33.000.000</b>	<b>93.369.760</b>
7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.000.000	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	<b>16.500.000</b>	49.037.010
7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.000.000	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	<b>16.500.000</b>	44.332.750
7	1	3	02.03		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>				<b>22.000.000</b>	<b>55.772.310</b>
7	1	3	02.03	1	Penyelenggaraan	20.000.000	20.000.000	PENDAPATAN	Prosentase	100 %	<b>22.000.000</b>	55.772.310



					Lembaga Kemasyarakatan			ASLI DAERAH (PAD)		Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan			
7	1	3	02.05		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	30.000.000	30.000.000					33.000.000	58.300.000
7	1	3	02.05	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	30.000.000	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	33.000.000	58.300.000
7	1	4			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	132.779.300	116.826.300					128.508.930	304.496.979
7	1	4	02.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	114.779.300	106.879.300					117.567.230	210.128.419
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	64.779.300	56.879.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100 %	62.567.230	113.552.269
7	1	4	02.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.000.000	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100 %	55.000.000	96.576.150
7	1	4	02.02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	18.000.000	9.947.000					10.941.700	94.368.560
7	1	4	02.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat	18.000.000	9.947.000	PENDAPATAN ASLI		Prosentase Penyelenggaraan	1 laporan	10.941.700	94.368.560



					Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			DAERAH (PAD)		Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan			
7	1	5			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	100.000.000	100.000.000					110.000.000	-
7	1	5	02.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	100.000.000	100.000.000					110.000.000	190.381.510
7	1	5	02.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100.000.000	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	110.000.000	124.471.490
7	1	6			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	39.306.600	39.306.600					43.237.260	-
7	1	6	02.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	39.306.600	39.306.600					43.237.260	198.054.096
7	1	6	02.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.498.200	4.498.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100 %	4.948.020	57.026.816
7	1	6	02.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	20.000.000	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan	100 %	22.000.000	20.000.000





										Umum Tingkat Kecamatan			
7	1	6	02.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4.142.000	4.142.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100 %	<b>4.556.200</b>	57.966.920
7	1	6	02.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	10.666.400	10.666.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100 %	<b>11.733.040</b>	63.060.360
<b>TOTAL</b>						<b>4.427.239.017</b>	<b>4.427.239.017</b>					<b>4.869.962.919</b>	<b>6.909.073.403</b>

(Sumber : <https://garutkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah> (RANHIR RKPD perubahan 2023)).



## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut Tahun 2023, disusun sebagai penyesuaian terhadap adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan yang telah ditetapkan pada RKPD dan atau Renja sebelumnya yang mencakup perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya harus ditingkatkan dari yang telah ditetapkan serta dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cibalong Tahun 2023 ini, dilakukan untuk memberikan landasan yuridis dalam keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cibalong yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah, Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman atau dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023.
2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing-masing instansi daerah perlu menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara



berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pada akhir Tahun Anggaran 2023, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi evaluasi pencapaian sasaran kegiatan, maupun kesesuaiannya dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Perubahan rencana kerja ini, maka seluruh jajaran pemerintahan hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

